

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia dan selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi yang paling mendasar dan selalu menjadi pusat perhatian hampir di setiap negara. Di negara berkembang masalah ketimpangan pendapatan telah menjadi pembahasan utama. Permasalahan yang sering muncul dan yang sering terjadi di negara maju dan berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Pemicu tingkat ketimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya telah menjadi beberapa isu yang paling sering diperdebatkan oleh pembuat kebijakan dan peneliti. Isu ketimpangan di Indonesia telah menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ketimpangan tersebut muncul dari ketimpangan ekonomi pada pembagian distribusi pendapatan yang tidak merata.

Terjadinya ketimpangan pendapatan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pendapatan ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.



Kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan (Sofyan, 2010).

Melihat hal ini, pertumbuhan belum tentu memberi jaminan bahwa ketimpangan pendapatan akan rendah. Banyak negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ( $\pm > 7$  persen per tahun), namun tingkat ketimpangan pendapatan juga tinggi. Apabila ketimpangan ini dibiarkan melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan. Setidaknya ada dua potensi dampak dari ketimpangan yang dilaporkan dengan baik dalam literatur yang ada. Pertama berkenaan dengan pengaruhnya pada kinerja perekonomian atau kemakmuran. Kedua, bagaimana ketimpangan bisa memengaruhi stabilitas masyarakat. Kedua efek tersebut penting dan juga saling memengaruhi. Di satu sisi, kenaikan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk stabilitas masyarakat. Di sisi lain, stabilitas dipandang sebagai prasyarat yang

bagi kemakmuran seperti itu (Tadjoeddin, 2017).



Pembangunan ekonomi akan dianggap berhasil apabila pertumbuhan ekonomi mampu seimbang dan tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah adalah salah satu masalah perekonomian Indonesia yang belum terselesaikan sampai sekarang. Rata-rata atau laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebesar 6,48 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang memiliki kinerja pertumbuhan sebesar 5,41 persen per tahun. Perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung memburuk dengan rata-rata angka indeks gini sebesar 0,40 poin. Sumber ketimpangan tertinggi berada di provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan rata-rata angka ketimpangan sebesar 0,38 poin (Amaluddin, 2020).

Ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks gini di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2012-2022 juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka indeks gini yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berkisar 0,316-0,422. Provinsi dengan ketimpangan tertinggi berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 0,422 dan 0,408. Mayoritas provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki kategori ketimpangan sedang, akan tetapi provinsi Maluku Utara dan Maluku memiliki tingkat ketimpangan rendah yaitu sebesar 0,316 dan 0,347. Sesuai dengan keadaan tersebut, dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antar daerah khususnya ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan elemen pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang efektif



rbagai sektor publik. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk kan efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya, menstimulasi

perekonomian untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, dan menjaga stabilitas perekonomian. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan dalam upaya pembentukan modal manusia. Di samping itu, pengeluaran pemerintah juga dibutuhkan untuk meningkatkan akumulasi modal, menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output perekonomian (Rosen, 2014; Sukirno, 2013). Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah juga diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azwar, 2016).

Dalam upaya meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah menjadi komponen penting dari instrumen kebijakan fiskal. Hal ini sejalan dengan beberapa telaah teoritis yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi dan sosial akan berdampak terhadap tiga hal, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perbaikan distribusi pendapatan (Wahyudi, 2020).

Ketimpangan pendapatan sendiri tidak hanya disebabkan oleh pengeluaran pemerintah saja melainkan ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan seperti perbedaan tingkat investasi antar wilayah. Investasi sendiri merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kemampuan produksi suatu wilayah, hal ini dikarenakan bertambahnya modal masuk akan meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan pada suatu perusahaan atau daerah tertentu. Penanaman modal sendiri dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, ketika terdapat tambahan investasi maka akan



akan jumlah produktifitas yang akan berujung pula dengan  
atnya kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatkannya

penyerapan tenaga kerja yang dapat terserap dan akan berimbas pula pada daya beli masyarakat yang meingkat, dimana akan berpengaruh pada pendapatan perkapita (M. Royan, 2019).

Banyak investasi yang terpusat di beberapa daerah merupakan alasan terjadinya ketimpangan, dan tidak menuntut kemungkinan bahwa tingkat investasi yang ada pada satu daerah sangat tinggi dan pada daerah yang lain memiliki tingkat investasi yang rendah. Meningkatnya investasi yang positif pada suatu wilayah merupakan hal yang baik, bahkan hal itulah yang menjadi tujuan dari pemerintah setiap daerah. Tetapi ketika tingginya tingkat investasi hanya terpusat pada beberapa wilayah saja maka akan menimbulkan permasalahan jangka panjang seperti ketimpangan pendapatan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dengan ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan berbasis infrastruktur, yang pada awalnya mengurangi pengangguran, pada akhirnya juga akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat (Akinbobola dan Saibu, 2004).

Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia berdampak terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik diharapkan dapat mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang

(Naukoko dan Siwu, 2023), (Walujadi dan Endri, 2022). Kondisi IPM yang merata menjadi penyebab ketimpangan pendapatan karena daerah



yang lebih berkembang memiliki tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi daripada daerah yang kurang berkembang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan baik langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan: maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung terhadap



ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang memberikan manfaat keterkaitan secara langsung dengan penelitian yang relevan yaitu:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, investasi, Indeks Pembangunan Mansuai, pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dengan tujuan mengentaskan ketimpangan pendapatan di masa depan.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang analisis ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.
3. Diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal pengurangan ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Distribusi Pendapatan ialah peristiwa dimana terjadinya kesenjangan antara penduduk dengan perekonomian tinggi dan penduduk dengan perekonomian rendah. Keadaan ini sering berlangsung dikarenakan jumlah masyarakat yang kaya lebih besar dibandingkan masyarakat miskin. (Fanshuri, Mahardika, dan Saputra, 2022). Todaro (2003:234) mengemukakan definisi ketimpangan distribusi pendapatan ialah perbedaan pendapatan yang terkait antara pendapatan warga negara yang tinggi dengan pendapatan warga negara yang rendah. Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan dampak yang bisa mempengaruhi kelanjutan pembangunan di bidang ekonomi (Prastiwi, Laut, dan Destiningsih, 2018). Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Hidayat dan Erlyn, 2021).

Distribusi pendapatan (*income distribution*) merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara/daerah. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara

masyarakat dengan pendapatan tinggi dan berpendapatan rendah k terlalu menyolok dalam perekonomian (Wahyudi, 2023).



Besar kecilnya distribusi pendapatan menunjukkan jumlah total pendapatan yang diterima oleh berbagai kelompok dan mencerminkan kesenjangan di antara penerima yang berbeda, apa pun sumber pendapatannya. Berdasarkan ukuran distribusi pendapatan, seseorang dapat dianggap berpenghasilan rendah dan masih memiliki sebidang tanah. Penelitian sebelumnya di Indonesia mengidentifikasi individu yang berpendidikan lebih tinggi, pekerja berketerampilan tinggi, dan pemilik modal mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat kurang mampu (De Silva dan Sumarto, 2015; Miranti., 2013; Wicaksono, Amir, dan Nugroho., 2017).

Menurut Kuznet ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung semakin besar selama tahap-tahap awal pembangunan, setelah tahap awal yang berganti ke tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan terbalik menjadi lebih kecil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan yang baru terbalik menuju tingkat pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Dalam kurva yang ditunjukkan oleh Kuznet, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif (Hidayat, 2014).

Teori ketimpangan dan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Benabou (1996) mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada bagaimana ketimpangan dapat ak pada berbagai aspek perekonomian. Benabou berpendapat bahwa etimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap



pertumbuhan ekonomi, terutama dampaknya terhadap akumulasi sumber daya manusia. Dalam masyarakat dengan kesenjangan pendapatan yang signifikan, individu dengan latar belakang berpendapatan rendah mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan dan peluang pengembangan keterampilan, yang menghambat produktivitas dan inovasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, teori Benabou menekankan peran faktor sosial dan politik dalam membentuk hubungan antara kesenjangan dan pertumbuhan. Tingkat kesenjangan yang tinggi dapat menyebabkan keresahan sosial, ketidakstabilan politik, dan berkurangnya kohesi sosial, yang semuanya dapat berdampak buruk pada investasi, kewirausahaan, dan kinerja perekonomian secara keseluruhan (Byaro, Ngowi, dan Rwezaula, 2024).

Ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan melalui perhitungan Indeks Rasio Gini (Gini ratio). Indeks ini menjelaskan tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini akan memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan yang dilihat dari tinggi atau rendahnya nilai koefisien gini (Febriyani dan Anis, 2022). Ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan koefisien Gini, mencerminkan distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Koefisien Gini yang tinggi menandakan ketimpangan yang semakin besar, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan total terkonsentrasi pada sebagian kecil penduduk, sedangkan koefisien yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Ketimpangan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk disparitas upah, perbedaan akses terhadap sumber daya dan peluang, serta

kekayaan yang tidak merata. Misalnya, dalam masyarakat yang ketimpangan pendapatan yang signifikan, individu atau keluarga terkaya



seringkali menguasai sumber daya dan kekuasaan dalam jumlah yang tidak proporsional, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi dan berkurangnya mobilitas sosial (Atkinson, 2015).

Ketimpangan dalam studi empiris yaitu ketimpangan antar golongan masyarakat yang diukur Gini Rasio. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang gini rasionya meningkat (Kuncoro, 1997). Semakin timpang pola distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi diakibatkan meningkatnya agregat saving rate yang diiringi dengan meningkatnya investasi maupun pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan oleh orang-orang kaya yang mempunyai rasio tabungan yang tinggi daripada orang-orang miskin. Apabila diasumsikan tujuan masyarakat hanya satu yaitu laju pertumbuhan PDRB, maka strategi terbaikpun ialah pola distribusi pendapatan yang mungkin setimpang. Sebaliknya jika keinginan masyarakat ialah pemerataan distribusi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat pula.

Distribusi pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Pertama, distribusi pendapatan “fungsional” ataupun distribusi pendapatan menurut bagian dari faktor distribusi, mengenai keadaan distribusi pendapatan di berbagai negara yaitu digambarkan dua hal yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima dari berbagai golongan didasarkan pada besar pendapatan yang diterima (Ahluwalia, 1997; Hariadi, Bawono dan Arintoko, 2008). Menggolongkan penduduk penerima pendapatan : a. 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah, b. 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah dan c. 40 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi.



dua, Distribusi pendapatan mutlak yaitu presentase jumlah penduduk mana pendapatannya mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang

dari yang ada. Ukuran umum yang digunakan yaitu kriteria Bank Dunia dengan ketidakmerataan tertinggi apabila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Dan ketidakmerataan rendah apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah mendapatkan lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional (Ahluwalia, 1977).

Beberapa hal yang dapat dijadikan untuk indikator dalam mengukur pemerataan distribusi pendapatan, yaitu: pertama Kurva Lorenz, Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan dari penduduk. Kurva Lorenz ini terletak dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambungkan presentase kumulatif dari pendapatan nasional, sedangkan dari sisi datanya mewakili presentase kumulatif dari penduduk. Kurva ini ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar. Apabila kurva Lorenz semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan bahwa distribusi pendapatan nasional semakin merata. Namun sebaliknya, apabila kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan semakin memburuk, dimana distribusi pendapatan nasional semakin timpang juga tidak merata.

Kedua, Indeks Gini atau Rasio Gini. Gini ratio ialah suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan cara membandingkan luas antara diagonal maupun kurva Lorenz yang dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Data yang diperlukan untuk perhitungan gini ratio yaitu Jumlah rumah tangga ataupun penduduk. Rata-rata pendapatan ataupun pengeluaran rumah tangga yang telah



okkan menurut kelasnya. Ketiga, Kriteria Bank Dunia. Kriteria pemerataan versi bank dunia yang didasarkan dari porsi pendapatan

nasional yang dinikmati dari tiga lapisan penduduk, yakni 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Keempat, Indeks Williamson. Indeks Williamson berbicara tentang angka indeks menunjukkan semakin ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Secara luas, Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Matolla dalam (Puspanika, 2007) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Dari angka tersebut, akan tercirikan seberapa berhasilnya pembangunan daerah di suatu wilayah, sehingga nantinya dievaluasi dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Berikut ini adalah kriterianya: kesenjangan rendah :  $IW < 0,35$ , kesenjangan sedang :  $0,35 \leq IW \leq 0,5$  dan kesenjangan tinggi :  $IW > 0,5$ .

### 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah perekonomian yang dimana barang dan jasa diproduksi oleh masyarakat bertambah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi karena jika dilihat dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan perkapita terus menerus meningkat, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang belum uti dengan kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno, 2004).



Menurut Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB rill. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pandangan Teori Klasik menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter: menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar: mewujudkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Teori Neo-Klasik: melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Teori klasik merupakan dasar pemikiran dari pembangunan ekonomi yang didasarkan pada sistem liberal yang mana pertumbuhan ekonomi akan mendorong keinginan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Apabila keuntungan tersebut meningkat, tabungan dan investasi akan meningkat juga. Melalui skala produksi dan permintaan akan meningkat terhadap tenaga kerja, sehingga tingkat upah akan meningkat. Dengan demikian, adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dan suplai akan mempengaruhi pada penurunan tingkat

itas serta keuntungan.



Hal ini karena berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (diminishing return) yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah sumber daya alam, seperti luas tanah. Akibat produksi ini, permintaan akan tenaga kerja dan upah menurun. Menurut teori klasik, dalam kondisi seperti ini perekonomian mengalami tingkat kejenuhan atau keadaan stasioner. Ini adalah sebuah keadaan dimana perekonomian telah dewasa, mapan dan masyarakat telah sejahtera, tetapi tanpa perkembangan lebih lanjut.

Teori Harrod-Domar merupakan sebuah tambahan dari teori pertumbuhan ekonomi dimana pada teori ini yang dikembangkan dari Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar. Teori ini ialah sebuah perkembangan teori Keynes. Dasar pemikiran teori ini ialah analisis yang diaplikasikan oleh Keynes yang dianggap kurang lengkap karena tidak dapat membahas mengenai masalah-masalah ekonomi untuk jangka panjang. Harrod-Domar mencoba menganalisis syarat-syarat yang dibutuhkan untuk perekonomian untuk tetap tumbuh dan berkembang pada jangka panjang (*steady growth*).

Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori pengeluaran agregat dari Keynes mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dan investasi, baik pada permintaan agregat (AD) maupun pada perluasan kapasitas produksi penawaran agregat (AS), yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa teori pertumbuhan Harrod dan Domar (dikenal dengan sebutan H-O) adalah suatu gabungan dengan modifikasi dari teori pertumbuhan dari Domar dan teori pertumbuhan dari Harrod. Teori pertumbuhan Harrod-Domar diperlukan investasi baru yang bersifat neto tambahan pada cadangan atau

ham.



Pembangunan mempunyai tujuan yaitu pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal tersebut didasarkan pada teori trickledown effect. Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.

Berdasarkan teori-teori pertumbuhan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika laba meningkat, demikian juga tabungan. Sementara teori Keynesian berfokus pada permintaan agregat yang lebih efisien didalam negeri untuk mengatasi stgnasi factor produksi. Adanya permintaan agregat yang efisien dapat membentuk pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian disempurkan oleh teori Harrod-Dommar menyatakan bahwa pertumbuhan meningkatkan jumlah investasi. Jika pertumbuhan ekonomi Masyarakat rendah, hal itu disebabkan oleh rendahnya investasi.

### 2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan



2006). Todaro (2000) mengatakan bahwa untuk meningkatkan pemerataan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar

kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya.

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Para ekonom mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah menjadi tiga jenis utama:

- a. Pengeluaran saat ini atau pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas barang dan jasa untuk penggunaan saat ini untuk memenuhi kebutuhan individu atau kolektif anggota masyarakat secara langsung
- b. Belanja modal atau pembentukan modal tetap (atau investasi pemerintah) - pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa yang dimaksudkan untuk menciptakan manfaat di masa depan, seperti investasi pada infrastruktur transportasi (jalan raya, bandara, kereta api), dan kesehatan (pengumpulan



dan distribusi air, sistem drainase kesehatan , komunikasi (telepon, radio, televisi) dan belanja penelitian (pertahanan, luar angkasa, genetika, dll.

- c. Pembayaran transfer - pengeluaran yang tidak melibatkan transaksi barang dan jasa, namun mewakili transfer dana, seperti pembayaran jaminan sosial, pensiun, dan tunjangan pengangguran.

Intervensi negara terhadap perekonomian melalui kebijakan belanja berasal dari upaya mengatasi dan memperbaiki kelemahan mekanisme pasar dan sektor swasta. Kelemahan mekanisme pasar ini pada gilirannya menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak tepat, yang dengan sendirinya merupakan hambatan bagi pembangunan. Oleh karena itu, redistribusi kekayaan, mencapai stabilitas ekonomi, dan mengatasi kegagalan pasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi merupakan motivasi utama intervensi negara dan berkontribusi terhadap penciptaan dan distribusi output, dan yang paling membutuhkan intervensi negara adalah perekonomian negara-negara berkembang yang sedang tersendat dalam pembangunan, dimana kontribusi sektor publik terhadap produk domestik bruto merupakan proporsi yang besar (Glenn Follette, 2010).

Tujuan pembelanjaan dapat dinyatakan. pemerintahan sebagai berikut; a) Memasok barang dan jasa yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti pertahanan, jalan dan jembatan; barang yang memenuhi syarat seperti rumah sakit, sekolah, pembayaran kesejahteraan dan tunjangan termasuk tunjangan pengangguran dan cacat. b) Mencapai perbaikan pada sisi penawaran perekonomian secara keseluruhan, seperti belanja pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. c) Memberikan dukungan kepada

yang mungkin memerlukan dukungan keuangan untuk beroperasi atau ang. Sektor swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan ini,



dan oleh karena itu, sektor publik memainkan peran penting dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Misalnya, Proyek infrastruktur transportasi tidak akan menarik pembiayaan swasta kecuali pemerintah menyediakan pengeluaran yang diperlukan untuk industri tersebut. d) Untuk membantu mendistribusikan kembali pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Abdul Ameer, 2024).

Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Belanja modal untuk infrastruktur meningkatkan akumulasi modal, sehingga meningkatkan potensi output perekonomian. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi perekonomian dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen struktur yang saling berhubungan yang mendukung keseluruhan kerangka struktur pembangunan termasuk komponen fisik dari sistem yang saling berhubungan. Hal ini juga memberikan akses terhadap barang dan jasa yang memungkinkan kondisi kehidupan masyarakat tetap terjaga atau tercapai (Nugroho dan Syahnur, 2022).

Artinya, tidak hanya kegiatan produktif yang akan menciptakan output dan lapangan kerja, namun kehadiran infrastruktur juga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan perekonomian di sektor lainnya. Infrastruktur dibagi menjadi dua kategori: infrastruktur fisik dan sosial. Infrastruktur fisik diperlukan untuk mendukung langsung kegiatan ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, sedangkan infrastruktur sosial meningkatkan efisiensi dan kapasitas tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesehatan, seperti belanja modal (belanja produktif), belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan serta bandara dan bandar udara. Belanja modal diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dalam perekonomian. Hal ini menciptakan manfaat masa depan dengan



meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, sehingga memungkinkan perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Misalnya, pembangunan jalan tidak hanya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pergerakan barang dan jasa. Tapi juga merangsang aktivitas bisnis untuk meningkatkan dan mengurangi biaya logistik.(Sahoo, Dash, dan Nataraj, 2010).

#### **2.1.4 Investasi**

Pada hakekatnya, investasi merupakan faktor yang menunjang pembangunan ekonomi. Investasi ini dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah, atau kerjasama antara swasta dan pemerintah. Investasi juga merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, dan untuk menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Menurut teori Klasik, investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Investasi juga sebagai sarana untuk motivasi dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan output. Inflasi terjadi apabila kuantitas uang bertambah dan inflasi berhenti apabila kuantitas uang distabilisasi. Dalam hal ini, tingkat harga sangat bergantung secara langsung dengan kuantitas uang, sedangkan menurut Keynes suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun kuantitas uang konstan.

Teori neo klasik tentang investasi pada pokoknya berdasarkan pada teori produktivitas (Marginal Productivity) dari faktor produksi modal.yang dengan produktivitas adalah tambahan proses produksi. Menurut teori ini modal yang akan diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh



produksi marjinalnya. Menurut teori neo-klasik (Sukirno, 2013) ada tiga unsur yang diperhitungkan dalam menentukan investasi yaitu tingkat biaya barang modal, tingkat bunga dan tingginya pendapatan yang akan diterima. Perubahan dalam satu faktor akan mengakibatkan perubahan dalam perhitungan profitabilitas.

Teori keynes didasarkan kepada konsep *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) yaitu tingkat diskon (*rate of discount*) yang dikehendaki untuk menyamakan seluruh aliran pendapatan bersih yang diharapkan akan diperoleh dari suatu investasi dengan nilai investasi mula-mula. Dalam teori Keynes *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) berdasarkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Secara singkat, bila keuntungan yang diharapkan (MEC) adalah lebih besar dari tingkat bunga investasi maka boleh dilaksanakan dan sebaliknya. Bila MEC sama dengan tingkat bunga investasi boleh dilaksanakan boleh tidak bagi mereka yang memiliki dana (Mankiw, 2007). Dari uraian diatas, diketahui bahwa berapa tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat bunga yang berlaku dan MEC atau fungsi investasi. fungsi MEC atau fungsi investasi ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor.

Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa investasi adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat melalui investasi. Menurutnya investasi memberikan dua dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama menciptakan pendapatan atau dapat sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua memperbesar kapasitas



produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal atau dapat disebut “dampak penawaran investasi” (Jhingan, 2016).

Harrod-Domar juga memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2004).

Pembentukan modal atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan modal membawa kepada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada. Jadi pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Singkatnya, hakikat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Hal ini hanya mungkin jika laju pembentukan modal di dalam negeri cukup cepat, yaitu jika bagian dari pendapatan output masyarakat yang ada hanya sedikit saja dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan dalam peralatan modal.

Pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Pembentukan modal membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang makin meningkat. Kalau pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber daya alam secara tepat dan pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan berbagai macam kebutuhan masyarakat terpenuhi, standar hidup meningkat, dan kesejahteraan ekonomi. Akhirnya laju pembentukan modal menaikkan



pertumbuhan ekonomi. Jadi laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada kenaikan laju pembentukan modal.

### 2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia (*Human Development*) adalah proses memperbesar pilihan orang. Pada prinsipnya, pilihan ini tidak ter batas dan berubah seiring waktu. Tetapi di semua tingkat perkembangan, tiga hal penting adalah agar orang-orang menjalani hidup yang panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar kehidupan yang layak. Jika pilihan penting ini tidak tersedia, banyak peluang lain tetap tidak dapat diakses (UNDP, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang diaplikasikan untuk memperkirakan jangkauan pembangunan sosio-ekonomi di sebuah negara dengan menggabungkan pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan penghasilan riil per kapita yang diselaraskan. Keadaan tersebut sebanding dengan teori pembentukan modal manusia yakni proses mencapai serta meningkatkan total manusia yang memiliki keahlian, pendidikan, dan pengalaman guna menentukan pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi tenaga kerja sumber daya manusia ialah pendidikan. (Sulistyaningrum dkk, 2022)

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan. Mankiw mengatakan bahwa pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah



mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut (Farhan dan Sugiarto, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dan akan membantu dalam pembangunan daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan yang tinggi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang memiliki pendidikan rendah, sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi atau menghasilkan output yang tinggi. Oleh karena itu, semakin baiknya kualitas sumber daya manusia akan mendorong kesejahteraan manusia dan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya (Toertiara dan Feriyanto, 2022).

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi ketimpangan pendapatan (*income disparity*) antar kelompok pendapatan. Peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan tahap perkembangan perekonomian suatu negara/daerah, namun peningkatan tersebut belum menjamin distribusi pendapatan menjadi merata.

Oleh karenanya, diperlukan intervensi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan :an yang terjadi, diantaranya melalui peningkatan pengeluaran ah. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat



memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Sanusi Fattah dkk (2022), mendapat hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung pemerataan pendapatan. Penambahan belanja modal dapat mengurangi tingkat ketimpangan apabila menghasilkan rasio terhadap PDRB yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya persentase kenaikan belanja modal harus melebihi persentase kenaikan PDRB pada tahun yang sama. Jadi variabel belanja modal dapat menjadi variabel penyeimbang dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi.

## 2.2.2 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan profit yang

akan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri.



Investasi juga akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat peningkatan kapasitas produksi maka pendapatan dan penawaran agregat akan tercipta. Dalam teori investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1997), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-domar, pembentukan modal tidak hanya diopandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Harrod-Domar menyatakan untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal.

Berdasarkan teori tersebut yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa meningkatnya investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut akan meningkat karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif sehingga ketimpangan pendapatan akan berkurang.

Investasi menurut Sukirno (2004) ialah penanaman modal yang dikeluarkan atau untuk membelanjakan barang-barang modal serta persediaan-persediaan produksi untuk meningkatkan ketangkasan memproduksi barang dan jasa perusahaan yang tersedia dalam perekonomian untuk mencapai keuntungan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat karena adanya partisipasi yang besar dari penanaman modal dalam bentuk investasi.

Tinggi atau rendahnya investasi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang

meningkat atau menurunnya ketimpangan pendapatan. (Febriyani dan :1).



Investasi merupakan suatu pengeluaran yang ditujukan untuk memperbanyak kuantitas alat-alat produksi dengan kesanggupan masyarakat dimana pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Indikator Investasi memperlihatkan bahwa Investasi didasarkan sesuai dengan penyaluran dari investor yang ada, dimana dengan investasi yang tinggi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Dan sebaliknya, jika Investasi rendah akan menimbulkan ketidaksetaraan atau kesenjangan yang lebih tinggi. (Triarsa dan Purbadharmaja, 2017).

### **2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada suatu daerah atau wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Menurut Becker and Posner (2007) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan

h tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang (Jhingan, 2016).



Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil studi empiris lainnya yang menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah, investasi, Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi menemukan hasil yang berbeda-beda di antara peneliti. Sebagian peneliti berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sebagian lainnya juga berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara hubungan variabel tersebut.

Sri Indriyani, dkk (2023) dalam penelitiannya mengenai analisis pengaruh RLS, pengeluaran perkapita, UHH, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di KBI dan KTI. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda data panel dengan metode analisis *Fixed Effect Model (FEM)* menemukan bahwa Kawasan Barat Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia.

Novia dan Utomo (2022), dalam penelitiannya mengenai analisis pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, pekerja disman ke atas, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di



provinsi Bali tahun 2016-2020. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, pekerja berpendidikan dan investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan di provinsi Bali tahun 2016-2020.

Sanusi Fattah, dkk (2022), dalam penelitiannya determinan ketimpangan pendapatan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda data panel dengan metode *Structural Equation Modeling* (SEM), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Wijayanti, dkk (2023), dalam penelitiannya mengenai analisis pengaruh investasi, angkatan kerja, dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) menemukan bahwa investasi yang dicerminkan oleh pembentukan modal tetap bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2018-2021.

Farhan dan Sugiano (2022), dalam penelitiannya mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) runtun waktu 2014-2022. Hasil

menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terhadap



ketimpangan pendapatan di pulau Jawa secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan.

Andhika (2023), dalam penelitiannya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur pada tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel menemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel pengeluaran pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Al Aqilah (2024), dalam penelitiannya mengenai analisis determinan ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera periode tahun 2012-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Julihanza dan Khoirudin (2023), dalam penelitiannya mengenai determinan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera periode tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Royan, dkk (2019), dalam penelitiannya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dengan persamaan model *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan



signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Fanshuri (2022), dalam penelitiannya mengenai analisis pengaruh upah minimum, kemiskinan, dan Indeks pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (studi kasus di kabupaten kawasan Sleingkar Wilis periode 2010-2019). Penelitian ini menggunakan analisis tipologi Klassen dan regresi data panel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)